

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Literatur

Penulisan skripsi ini, penulis mencari informasi dari berbagai penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang telah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku dan skripsi untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan, dengan tujuan memperoleh dasar teori yang ilmiah, untuk membantu penulis dalam pemahaman terkait dengan kasus maupun konsep yang digunakan.

Penulis menggunakan penelitian milik Rachel Citrin yang berjudul *The Impact of Official Development Assistance on Conflict in Afghanistan*. Dalam penelitiannya Rachel Citrin menuliskan mengenai dampak dan keberhasilan *Official Development Assistance* melalui program-programnya dalam konflik yang tengah terjadi di Afghanistan. Peneliti menyebutkan beberapa dampak dari program-program ODA yang pernah dilakukan di Afghanistan yang diantaranya program yang memberikan dampak baik ada program *Aga Khan Foundation* (2004-2006) di wilayah Badakshan. Program ini membantu mendiversifikasi tanaman local, meningkatkan infrastruktur global, melatih Perusahaan pengembangan Masyarakat local dan komite Perempuan untuk menangani masalah local dan membentuk badan usaha Perusahaan. Selanjutnya ada program *Mercy Corps*. *Mercy Corps* ini telah bekerja di Afghanistan sejak tahun 1986, Dimana program ini bermitra dengan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Afghanistan, mulai dari peningkatan layanan sanitasi hingga pertanian dan pelatihan kejuruan. (Citrin, 2021) Seperti Dalam tulisannya peneliti berasumsi bawah keberhasilan bantuan pembangunan resmi (ODA) sangat penting karena berbagai alasan termasuk stabilitan global dan regional, penyelesaian konflik sipil, dan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan.

Selanjutnya menggunakan penelitian karya Iryna Lukianova dengan judul penelitian *Norway's Development Assistance Policy: Legal framework, conceptual*

ground and current trends. Dalam penelitiannya peneliti menuliskan mengenai Norwegia secara aktif terlibat dalam memerangi pandemi dan mengatasi masalah lingkungan seperti sampah laut dan mikroplastik. Negara ini telah mereformasi kebijakan bantuan pembangunannya dengan berfokus pada lebih sedikit negara, meningkatkan pendanaan multilateral, melibatkan masyarakat sipil dan bisnis swasta, serta menerapkan program khusus seperti Minyak untuk Pembangunan dan Pajak untuk Pembangunan. Kebijakan bantuan pembangunan Norwegia mencerminkan ideologi negara kesejahteraan, moralisme, dan kepentingan kebijakan luar negerinya, menjadikannya salah satu donor *Official Development Assistance* (ODA) yang paling dermawan dengan fokus yang kuat pada pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, kesehatan global, dan kemanusiaan. (Lukianova, 2021)

Iryna meneliti bagaimana Norwegia mereformasi kebijakan bantuan pembangunannya, dan apa saja yang menjadi fokus utama dari kebijakan ini. Norwegia telah mereformasi kebijakan bantuan pembangunannya dengan beberapa cara agar lebih memadai untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mengatasi tantangan global. Area fokus utama kebijakan bantuan pembangunan Norwegia meliputi perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, pengembangan sektor swasta, dan bantuan kemanusiaan. Dimana Norwegia telah mereformasi kebijakan bantuan pembangunannya dengan beberapa cara agar lebih yang memadai untuk mencapai keputusan SDGs dan mengatasi tantangan global. (Lukianova, 2021, pp. 7-8)

Adapun faktor yang mempengaruhi pendekatan Norwegia terhadap *Official Development Assistance* (ODA). Peneliti juga menyoroti bagaimana lembaga-lembaga seperti Norad dan Norfund berkontribusi dalam mengimplementasikan kebijakan sekaligus lembaga mengawasi *Official Development Assistance* (ODA) di Norwegia. Dimana dalam pendekatan Norwegia terhadap bantuan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ideologi negara kesejahteraan, moralisme, internasionalisme yang manusiawi, dan kepentingan kebijakan luar negeri yang terkait dengan perdamaian internasional, stabilitas ekonomi, dan promosi nilai-nilai kebijakan luar negeri Norwegia. Badan-badan seperti Norad dan Norfund berkontribusi dalam mengimplementasikan kebijakan *Official Development*

Assistance (ODA) Norwegia dengan memberikan saran ahli, jaminan kualitas, mengelola skema bantuan, dan berinvestasi pada bisnis yang mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. (Lukianova, 2021, pp. 2-3)

Peneliti menggunakan teori dan konsep seperti *the welfare state ideology*, *moralism*, *humane internationalism*, dan *foreign policy interests* untuk menganalisis kebijakan bantuan pembangunan Norwegia.. Konsep-konsep ini membantu memahami pendekatan Norwegia terhadap kerja sama pembangunan dan motivasinya untuk terlibat dalam upaya bantuan internasional. Sehingga Norwegia menyoroti upaya kebijakan bantuan pembangunan sebagai prioritas utama kebijakan luar negerinya, makalah ini mengusulkan untuk menjelaskan kasus bantuan Norwegia dari sudut pandang identitas domestik Norwegia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam konteks politik dan ekonomi. Melalui pemberian bantuan pembangunannya sebagai bantuan tidak terikat dan dalam bentuk hibah, Norwegia mendapatkan reputasi sebagai negara yang memiliki motivasi altruistik dan berkomitmen kuat untuk mencapai kebaikan bersama di tingkat global. (Lukianova, 2021, pp. 5-6) Berangkat dari penelitian ini, penulis dapat menganalisis motivasi Norwegia selaku negara donor utama bantuan pembangunan melalui kebijakan *Official Development Assistance* (ODA).

Selanjutnya penulis menggunakan tulisan karya Mujgan dan Zubeyr dengan judul *The Effect of Foreign Aid on Economics Developments in Afghanistan*. Peneliti menyoroti keterbatasan program bantuan luar negeri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Afghanistan. Penelitian menunjukkan bahwa bantuan luar negeri saja tidak cukup untuk pembangunan ekonomi di negara-negara pasca-konflik seperti Afghanistan karena meningkatnya korupsi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran selama dua dekade aliran bantuan. Meskipun sudah dua dekade bantuan asing mengalir ke Afghanistan, kondisi ekonomi dan sosial negara ini belum membaik secara signifikan, mengindikasikan bahwa program-program bantuan asing mungkin perlu dievaluasi dan disesuaikan.

Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif terhadap bantuan luar negeri di negara-negara pasca-konflik, dan menyarankan agar

program-program bantuan disesuaikan untuk mengatasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh negara penerima, seperti dalam kasus Afghanistan. Dengan menganalisis kondisi ekonomi dan sosial di Afghanistan selama dua dekade, penelitian ini menawarkan wawasan tentang kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan penyaluran bantuan luar negeri, serta memberikan rekomendasi yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam merancang program bantuan luar negeri untuk negara berkembang dan negara pascakonflik.

Peneliti juga menjelaskan tantangan dalam memanfaatkan bantuan luar negeri secara efektif di Afghanistan. Pertimbangan politik dan strategis juga berperan dalam mempengaruhi keefektifan program bantuan asing di Afghanistan. Pertimbangan-pertimbangan ini perlu diperhatikan dengan seksama untuk memastikan bahwa sumber daya bantuan dialokasikan dan digunakan secara efisien untuk pembangunan negara. Mengingat tantangan kompleks yang dihadapi Afghanistan, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam program bantuan luar negeri harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik negara tersebut. Pendekatan ini dapat berupa perancangan intervensi yang ditargetkan dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan yang unik di Afghanistan untuk memaksimalkan dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan ekonomi.

Selanjutnya penulis menggunakan tulisan yang berjudul *Evaluating the Role of Norwegian aid in Afghanistan economic development: swot analysis and the role of actors*. (Baralian, Zaid, & Dyusenov, 2020) Penelitian ini mencoba mengevaluasi perkembangan kebijakan bantuan Norwegia kepada Afghanistan untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan analisis SWOT, memahami peran aktor-aktor kunci yang terlibat dalam dan perjanjian internasional yang terkait dengan bantuan Norwegia untuk Afghanistan. Penelitian ini menemukan, meskipun terdapat beberapa kelemahan, pemerintah Norwegia Pemerintah Norwegia menjadi aktor yang efektif dalam mempromosikan bantuan luar negeri ke Afghanistan melalui koordinasi yang efektif dalam upaya bantuan dan rekonstruksi.

Selanjutnya, penulis menggunakan tulisan karya Annika dan Natasi yang berjudul *The Scope and Impact of Official Development Assistance in Afghanistan*. Penelitian ini menguraikan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek-proyek kerja sama pembangunan. Proyek-proyek ditingkatkan melalui pemantauan dan pelaporan kembali kepada para donor. Laporan tersebut membantu dalam memutuskan kelanjutan pendanaan, perpanjangan, dan membentuk hubungan antara donor dan lembaga pelaksana. Sistem evaluasi yang dimodelkan pada strategi bisnis menilai keberhasilan proyek. Peneliti juga menyoroti pentingnya evaluasi eksternal dalam melacak kemajuan proyek, memastikan efektivitas *Official Development Assistance* (ODA), dan menjaga akuntabilitas dalam proyek kerja sama pembangunan.

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>The Impact of Official Development Assistance on Conflict in Afghanistan</i>	(Citrin, 2021)	Meneliti keberhasilan <i>Official Development Assistance</i> (ODA) dalam konflik yang terjadi di Afghanistan.	Menyoroti dampak dari <i>Official Development Assistance</i> (ODA) secara umum melalui program-program yang pernah diterapkan
2.	<i>Norway's Development Assistance Policy: Legal framework, conceptual ground and current trends.</i>	(Lukianova, 2021)	Meneliti Kebijakan Bantuan Pembangunan Resmi di Norwegia.	Menyoroti kebijakan ODA Norwegia melalui tantangan global dan Covid-19.
3.	<i>The Effect of Foreign Aid on Economics Developments in Afghanistan</i>	(Mujgan & Haidar, 2019)	Meneliti Efektivitas Kebijakan Bantuan di Afghanistan	Menyoroti keterbatasan program bantuan luar negeri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Afghanistan.
4.	<i>Evaluating the Role of Norwegian aid in Afghanistan economic development: swot analysis</i>	(Baralian, Zaid, & Dyusenov, 2020)	Mengevaluasi Perkembangan Kebijakan Bantuan di Afghanistan.	Mengevaluasi perkembangan kebijakan bantuan Norwegia kepada Afghanistan untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi dan sosial

	<i>and the role of actors</i>			dengan menggunakan analisis SWOT
5.	<i>The Scope and Impact of Official Development Assistance in Afghanistan</i>	(Annika & Natasi, 2023)	Meneliti perkembangan Kebijakan Luar Negeri dan Kebijakan Bantuan melalui <i>Official Development Assistance (ODA)</i>	Berfokus pada ruang lingkup dan dampak Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) di Afghanistan dengan melibatkan lembaga eksternal.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 *Humanitarian Assistance Theory*

Humanitarian Assistance Theory atau bantuan kemanusiaan menurut Jocelyn Kelly dalam *Journal of Humanitarian Assistance* menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan didasarkan pada kewajiban moral. Kewajiban moral merupakan suatu hal yang melatarbelakangi humanitarianism (Jocelyn Kelly, 2009). Kewajiban moral merupakan suatu keharusan untuk membantu mereka yang membutuhkan atau terkena dampak perpindahan seperti migrasi internal. Prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan didasarkan pada beberapa prinsip yaitu:

Humanitarian Assistance Theory adalah kerangka teoretis yang digunakan untuk memahami berbagai aspek bantuan kemanusiaan, termasuk prinsip-prinsip, tujuan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan tersebut. Teori ini berfokus pada bagaimana bantuan kemanusiaan dapat diberikan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam situasi darurat (Marian Konstantin Gatzweiler, 2017).

Humanitarian Assistance juga merupakan upaya non-koersif atau minim kekerasan yang lebih kepada pendekatan humanis yaitu aktor negara maupun nonstate berkomitmen untuk memberikan bantuan dan perlindungan kemanusiaan sesuai dengan hukum dan norma internasional. Perlindungan dan bantuan merupakan inti dari aksi kemanusiaan. Perlindungan kemanusiaan didefinisikan sebagai: "*All activities aimed at*

ensuring full respect for the rights of the individual in accordance with the letter and the spirit of the relevant bodies of law." Berdasarkan hukum dari diterapkannya bantuan kemanusiaan yaitu Konferensi Jenewa tahun 1951, Protokol New York 1967, dan instrument hukum internasional tentang kemanusiaan, pengungsi, Hak Asasi Manusia, peperangan dan bencana alam. Menurut *Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action* (ALNAP), aktor inti dalam pemberian *humanitarian assistance* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. *The providers*

The Providers merupakan negara donor atau Yayasan. Dalam hal ini Norwegia sebagai negara donor yang memberikan bantuan kemanusiaan melalui *Official Development Assistance* (ODA) di negara penerima yaitu Afghanistan.

2. *The Recipient*

The Recipient merupakan negara penerima yang terkena dampak bencana, peperangan dan konflik lainnya. Dalam hal ini Negara Afghanistan sebagai negara penerima yang terkena dampak dari konflik bersenjata yang menghancurkan, pergolakan sosial, dan kekurangan pangan yang parah, sehingga negara ini berada di tengah-tengah krisis kemanusiaan.

3. *The Implementers*

The Implementers merupakan organisasi atau individu yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik, bencana, atau krisis. Dalam hal ini Norwegia selaku negara yang memberikan bantuan kepada Afghanistan, dan keterkaitan Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkaitan dengan *Official Development Assistance* (ODA) Norwegia bekerja sama dalam meningkatkan pengembangan manusia melalui berbagai program, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. ODA Norwegia memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk meningkatkan kemampuan pengembangan manusia di negara-negara berkembang. (Nugraha, 2023)

Humanitarian Assistance Theory menyediakan landasan teoritis yang penting untuk mengevaluasi efektivitas ODA Norwegia dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan tantangan dalam bantuan kemanusiaan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana ODA dapat dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks kemanusiaan (Hetharie & Hetharie, 2020)

2.2.2 *Aid Effectiveness*

Aid Effectiveness secara sederhana dapat diartikan sebagai efektifitas bantuan pembangunan (*development aid*) dalam mencapai pembangunan manusia dan ekonomi, atau juga dapat diartikan sebagai target-target pembangunan. (Mahottama, 2012) Agensi-agensi donor dan lembaga-lembaga internasional terus menerus mencari cara-cara baru untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas bantuan, termasuk dalam *conditionality*, *capacity building*, dan usaha untuk meningkatkan *governance*. (Kauffman.D, 2009) Isu mengenai *aid effectiveness* ini mendapat perhatian semenjak munculnya banyak laporan mengenai kegagalan usaha bantuan luar negeri dalam upaya Pembangunan.

Dengan menggunakan teori *Aid Effectiveness*, efektivitas bantuan kemanusiaan yang diberikan dapat dilihat dari beberapa indikator peratama *Conditionality*. *Conditionality* merujuk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh donor kepada negara penerima untuk memastikan bahwa bantuan digunakan secara efektif dan sesuai tujuan. Dalam konteks Afghanistan, Norwegia telah menyatakan bahwa bantuan yang diberikan bergantung pada komitmen pemerintah Afghanistan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu, seperti penyelesaian konflik politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Norwegia menerapkan *conditionality* sebagai mekanisme untuk mendorong reformasi dan stabilitas di Afghanistan. (Norway and Afghanistan "About the Embassy", 2017)

Dalam konteks Afghanistan, yang sangat rentan terhadap konflik dan krisis kemanusiaan, Norwegia menerapkan persyaratan bersyarat dalam bentuk persyaratan terkait hak asasi manusia dan komitmen terhadap perdamaian sebagai

prasyarat pendanaan. Hal ini memastikan bahwa bantuan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mendukung stabilitas sosial-politik jangka panjang. Studi dari jurnal Efektivitas bantuan: *Human rights as a conditionality measure* menunjukkan bahwa penerapan persyaratan berbasis hak asasi manusia merupakan instrumen penting bagi donor seperti Norwegia untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi sambil mempertahankan legitimasi program bantuan mereka. (Douch, Edward, & Landman, 2022)

Untuk mengelola bantuan kemanusiaan yang diberikan, melalui indikator lainnya yaitu *Capacity building* dapat melihat upaya untuk memperkuat kemampuan institusi dan sumber daya manusia di negara penerima agar dapat mengelola bantuan secara mandiri dan berkelanjutan. Norwegia telah berkontribusi dalam pembangunan kapasitas di Afghanistan melalui dukungan terhadap sektor pendidikan, terutama pendidikan bagi perempuan, serta pelatihan dan penguatan lembaga-lembaga lokal. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada bantuan asing. (Kauffman.D, 2009)

Kapasitas kelembagaan di Afghanistan mengalami keterbatasan yang serius akibat dampak konflik yang berkepanjangan, yang telah melemahkan fungsi-fungsi pemerintah dan struktur kelembagaan di berbagai sektor. Menyadari tantangan ini, *Official Development Assistance* (ODA) Norwegia diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas lokal, terutama melalui program pelatihan teknis yang ditujukan bagi pejabat pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah. Dalam dokumen *Capacity Development Beyond Aid*, dijelaskan bahwa negara donor seperti Norwegia tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga berupaya membangun sistem manajemen proyek yang efektif di tingkat lokal. Upaya ini meliputi pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara partisipatif. Strategi ini penting untuk memastikan pelaksanaan bantuan tidak bersifat jangka pendek, tetapi berkontribusi pada keberlanjutan program di masa depan dan memperkuat kemandirian lembaga lokal dalam

mengelola sumber daya dan merespon kebutuhan masyarakatnya. (Greijn & Hauq, 2023)

Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum. Kaufmann menekankan bahwa efektivitas bantuan sangat bergantung pada kualitas tata kelola di negara penerima. Di Afghanistan, tantangan seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi hambatan dalam penyaluran dan pemanfaatan bantuan. Norwegia, melalui komitmennya terhadap prinsip-prinsip *good governance*, berupaya memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya merespons kebutuhan kemanusiaan, tetapi juga mendorong reformasi institusional dan peningkatan tata kelola di Afghanistan. (Kauffman.D, 2009)

Peningkatan *Governance* merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas bantuan pembangunan di Afghanistan. Salah satu fokus utama dalam hal ini adalah mendorong pemerintah Afghanistan untuk dapat mengelola sumber daya secara lebih transparan, efisien dan bertanggung jawab, serta meminimalisir praktik-praktik korupsi yang selama ini menjadi kendala utama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dalam laporan evaluasi yang berjudul *Norwegian Aid Works - But Not Well Enough*, disebutkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi sangat kompleks, terutama dalam konteks tata kelola birokrasi yang lemah dan ketidakstabilan politik di negara penerima bantuan, Norwegia tetap menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung reformasi birokrasi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk bantuan teknis dalam perumusan kebijakan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah di berbagai tingkatan. (Norwegian Aid Evaluation Report, 2017)

Selain itu, Norwegia juga mendorong penerapan mekanisme *monitoring* yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas publik dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan melalui ODA Norwegia tidak semata-mata berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi sistemik

dalam praktik tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Afghanistan. (Norwegian Aid Evaluation Report, 2017)

Salah satu organisasi yang berkomitmen menangani masalah bantuan luar negeri adalah *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). (OECD, 2017) Pada tahun 2005, OECD menginisiasi pertemuan *Paris Declaration on Aid Effectiveness*. *Paris Declaration 2005* merupakan sebuah titik tolak munculnya kesadaran untuk lebih memperhatikan pertanggungjawaban atas aliran bantuan luar negeri di berbagai negara. Selama ini, usaha bantuan luar negeri seringkali dikritik tidak efektif dan hanya akan berfungsi sebagai alat pihak donor dalam mencapai tujuannya di negara penerima. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) merupakan Badan yang bertanggung jawab dalam mengurus penyaluran bantuan luar negeri salah satunya *Official Development Assistance* (ODA) Norwegia.

2.2.3 Official Development Assistance

Official Development Assistance (ODA) adalah bantuan resmi yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. ODA Norwegia merujuk pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah Norwegia melalui berbagai program dan proyek yang didanai oleh anggaran negara (Carvalho et al., 2020). Tujuan utama dari ODA adalah untuk mengurangi kemiskinan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan mendukung stabilitas global. Bantuan ini bisa dalam bentuk hibah (grant) atau pinjaman lunak, serta mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kemanusiaan (Maynard & Wales. Social Research Division, 2012).

Kebijakan ODA Norwegia terhadap Afghanistan difokuskan pada bantuan kemanusiaan dan pembangunan, terutama mengingat kondisi konflik dan krisis kemanusiaan yang melanda negara tersebut. Norwegia memprioritaskan bantuan yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Afghanistan, seperti program kesehatan, pendidikan, dan bantuan pangan. Kebijakan ini juga mencakup komitmen untuk mendukung hak asasi manusia, pembangunan demokrasi, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Norwegia bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, pemerintah setempat, dan

LSM untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Afghanistan yang rentan (Chanfreau-Coffinier et al., 2019).

Kerangka konseptual ini membantu dalam memahami bagaimana ODA Norwegia diimplementasikan di Afghanistan dan bagaimana efektivitasnya dapat dievaluasi. Dengan menggunakan Model Logika dalam konteks Bantuan Internasional, kita dapat mengidentifikasi dan menganalisis setiap tahapan dalam proses bantuan, dari input hingga dampaknya. Hal ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif dan sistematis terhadap efektivitas ODA Norwegia dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ditulis dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa Efektivitas *Official Development Assistance* (ODA) Norwegia berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kapasitas institusi lokal di Afghanistan, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan program-program kemanusiaan. Norwegia dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap bantuan kemanusiaan dan pembangunan internasional. Penelitian ini akan mengevaluasi seberapa efektif bantuan tersebut ketika diterapkan di Afghanistan, yang memiliki kondisi unik dan tantangan besar terkait stabilitas politik dan keamanan.

2.5 Kerangka Analisis

